

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

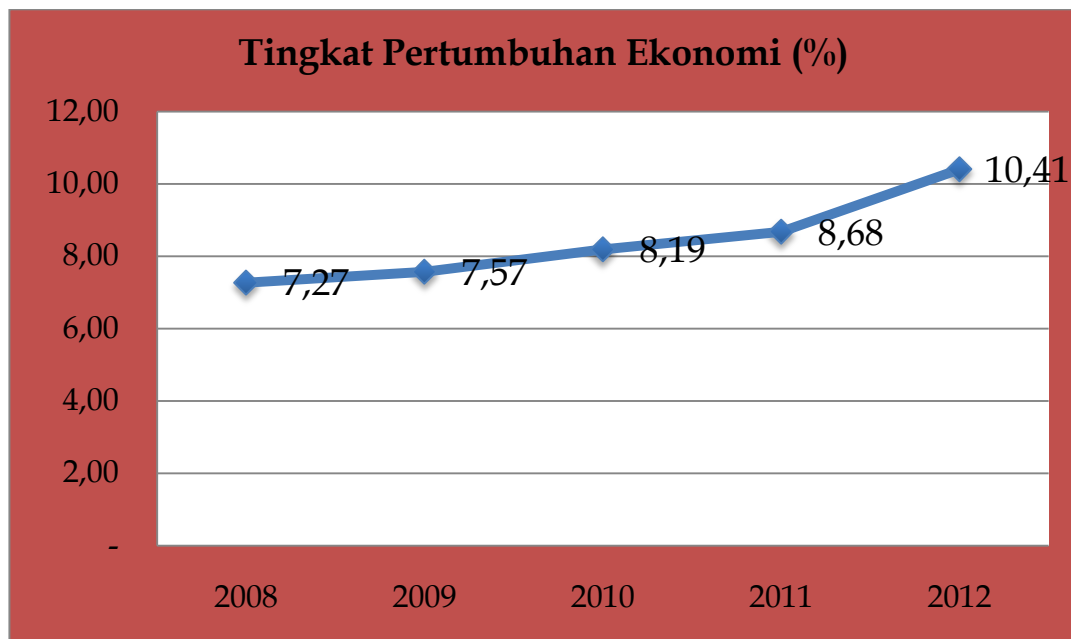
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013

A. Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara kurun waktu Tahun 2008-2012 mengalami kenaikan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya, hal ini diperlihatkan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,42 persen dengan kenaikan rata-rata mencapai 0,79 persen setiap tahunnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 28. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012



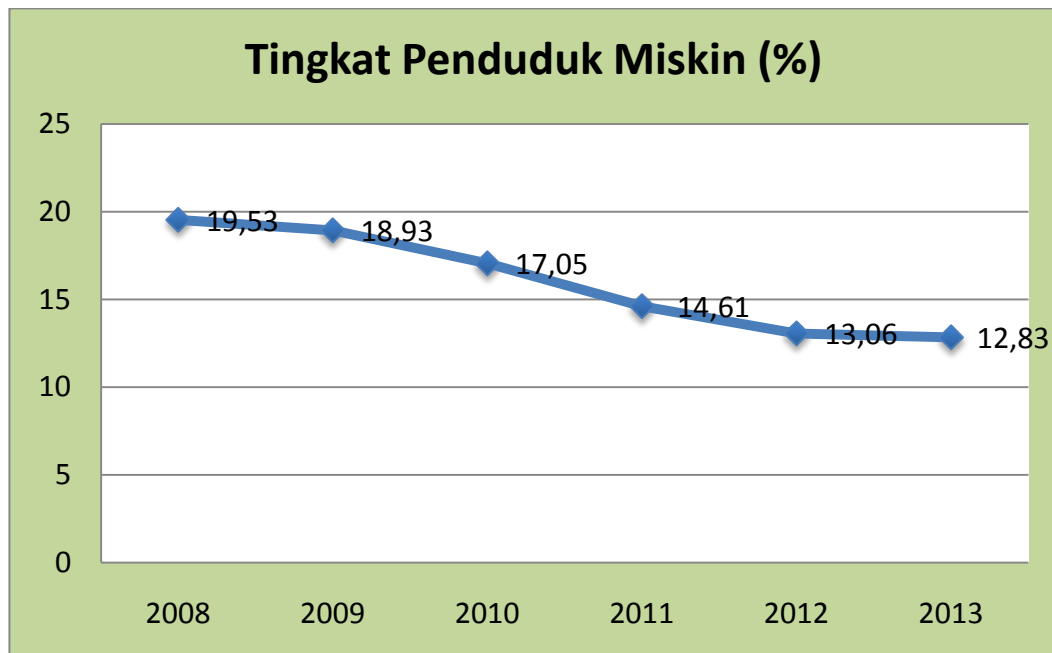
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013

Berdasarkan gambar tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara senantiasa mengalami kenaikan, Tahun 2008 mencapai 7,27 persen dan Tahun 2012 mencapai 10,41 persen.

B. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan Sulawesi Tenggara Menurun dari sebesar 19,53 persen tahun 2008 menjadi 12,83 persen tahun 2013. Upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan secara nasional maupun yang dilaksanakan oleh program dan kebijakan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup baik melalui program Bahteramas dengan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu: (1) Bantuan biaya pengobatan gratis sampai dengan rawat inap kelas 3; (2) Bantuan biaya operasional sekolah (BOP); (3) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan sebesar Rp. 100 juta dan kecamatan sebesar Rp. 50 juta. Namun demikian angka 12,83 persen masih termasuk tinggi dibanding dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 11 persen. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar berikut ini:

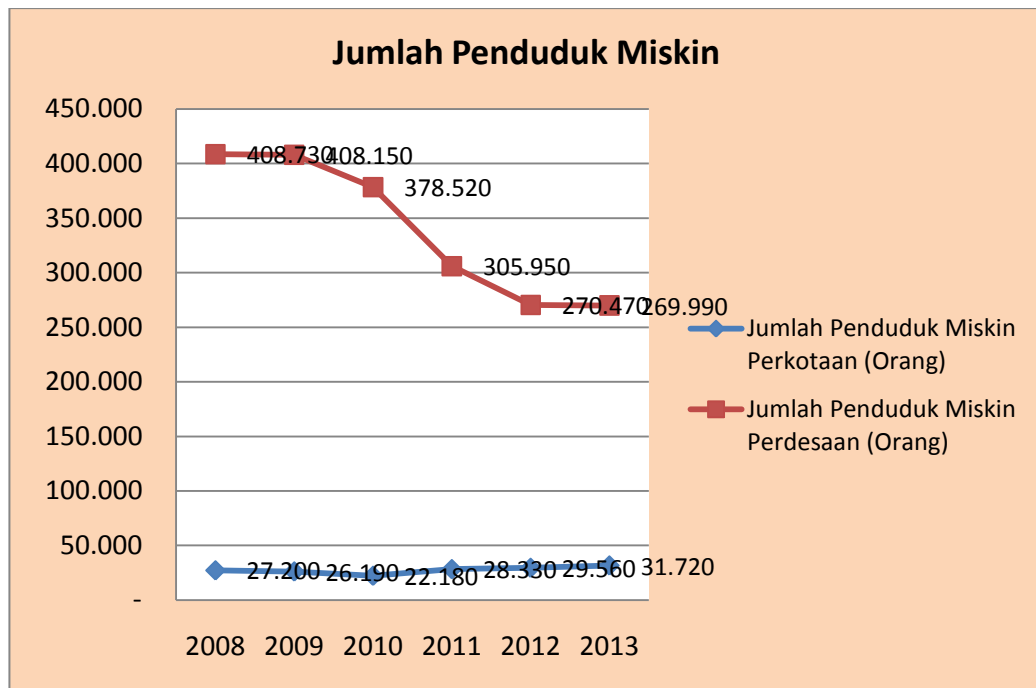
Gambar 29. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013



Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013

Namun demikian jumlah penduduk miskin masih cukup besar mencapai 301.710 orang Tahun 2013, di mana jumlah penduduk miskin terbesar berada pada pedesaan yang mencapai 90 persen dari total jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 30. Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013

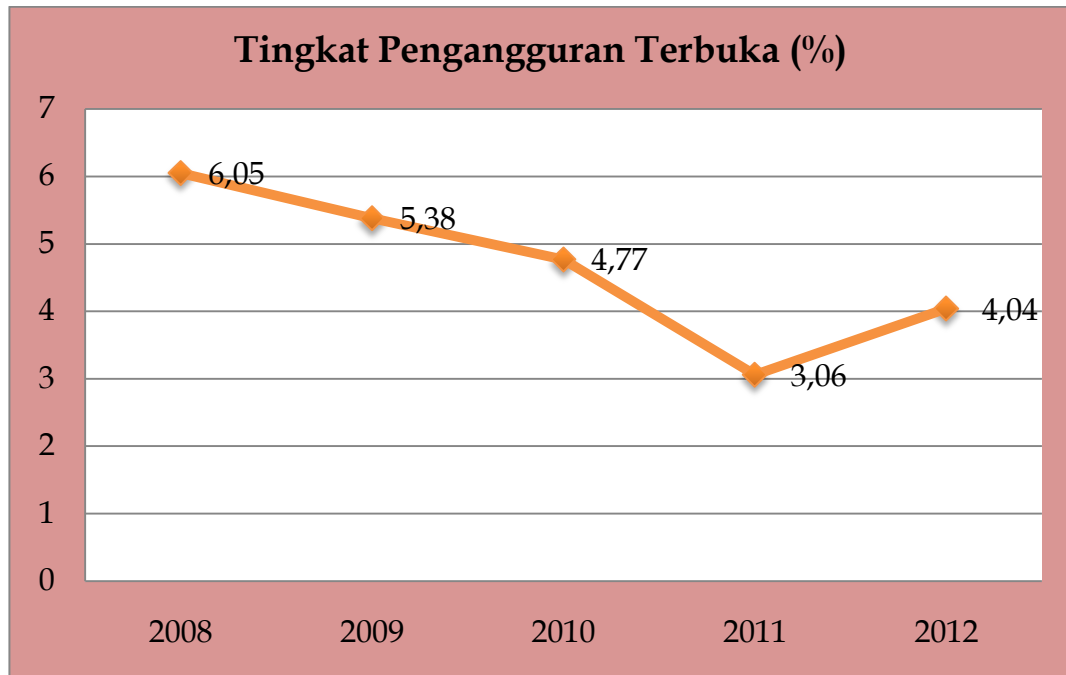


Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013

C. Pangsa Angkatan Kerja Menganggur

Penduduk yang bekerja pada Tahun 2012 mencapai 975.879 orang bila dibanding keadaan Tahun 2011 sebesar 1.026.548 orang. Jumlah pengangguran pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 50.669 orang jika dibanding keadaan Tahun 2011 yang mengalami penurunan jumlah kemiskinan sebesar 28.870 orang dari Tahun 2010. Kondisi tingkat pengangguran dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 31. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012

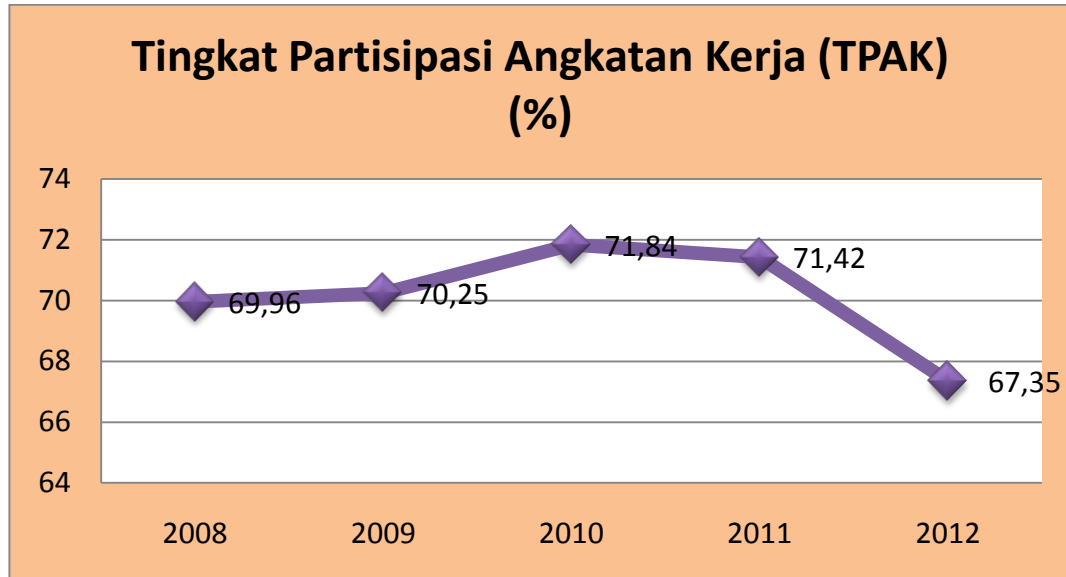


Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013

Pada gambar tersebut di atas bahwa terjadi peningkatan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara Tahun 2012 menjadi 4,04 persen bila dibandingkan Tahun 2011 mencapai 3,06 persen, hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian yang mencapai 67.775 orang pada Tahun 2012.

Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk yang telah bekerja dapat juga dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya, namun pada Tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Gambar 32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012



Sumber; BPS Prov. Sultra, 2013

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan, pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 67,35 persen pada Tahun 2012

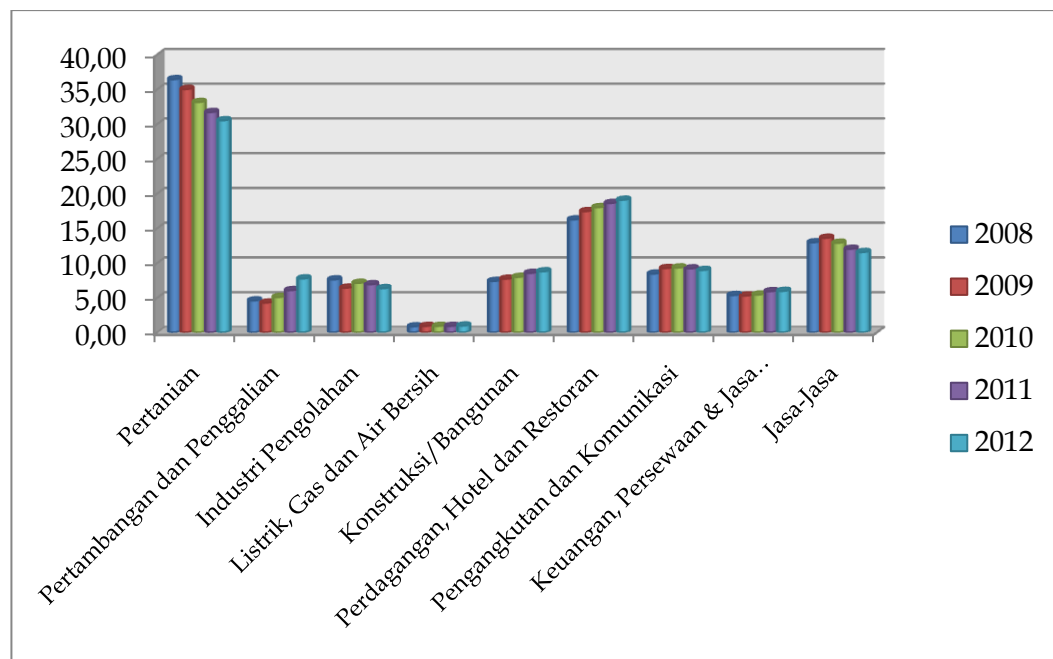
D. Agregat Supply

Secara umum PDRB menurut sektor usaha atau dari sisi penawaran dibedakan atas 9 sektor kelompok usaha yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik/gas/air bersih; (5) konstruksi dan bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) jasa-jasa. Kesembilan sektor ini mempunyai saling keterkaitan yang erat dimana apabila salah satu kelompok mengalami perubahan maka kelompok lainnya juga akan ikut berubah.

Dari sisi penawaran (*supply side*) PDRB Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012 masih didominasi oleh sektor pertanian, namun

kecenderungan mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2008 mencapai 36,44 persen dan pada Tahun 2012 mencapai 30,62 persen. Penurunan kontribusi sektor pertanian karena menurun produksi dan produktifitas beberapa komoditas mengalami penurunan selama kurun waktu Tahun 2008-2012, juga hal tersebut juga disebabkan karena meningkatnya sekto-sektor lain seperti pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 33. PDRB Menurut Sektor Usaha/Sisi Penawaran di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013

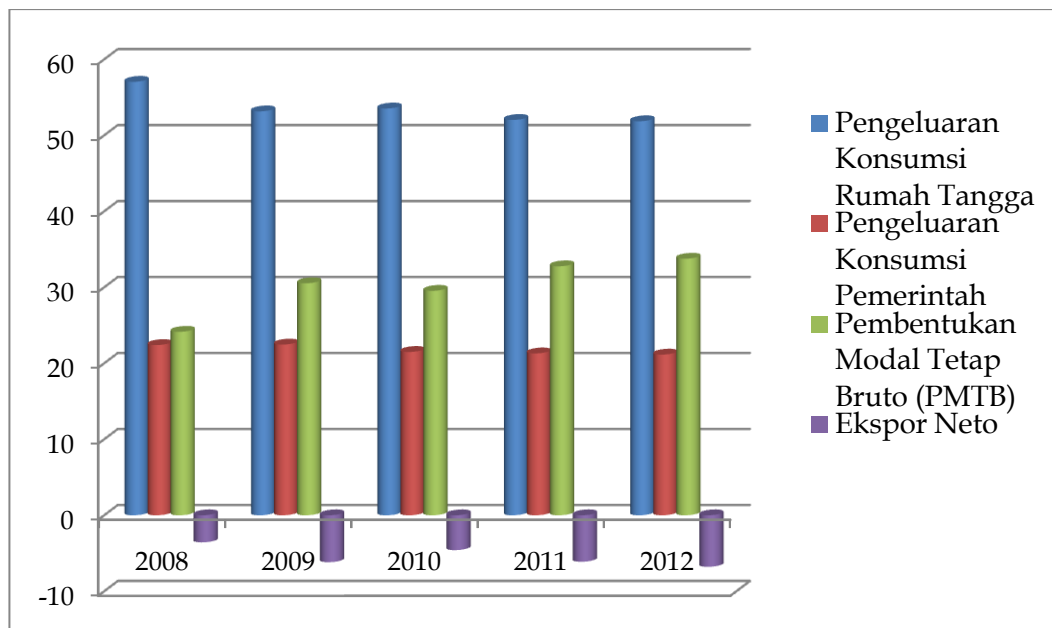
E. Agregat Demand

Secara umum PDRB menurut penggunaan dibedakan atas tiga kelompok yaitu kelompok konsumsi, kelompok investasi dan kelompok penggunaan di luar wilayah (*rest of the world*) neto. Ketiga kelompok ini mempunyai saling keterkaitan yang erat dimana apabila salah satu

kelompok mengalami perubahan maka kelompok lainnya juga akan ikut berubah.

Dari sisi permintaan (*demand side*) PDRB Sulawesi Tenggara Tahun 2012 didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi sebesar 73,01 persen yang terdiri dari 51,86 persen pengeluaran konsumsi rumah tangga (termasuk konsumsi lembaga swasta nirlaba) dan 21,15 persen pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori yang pada dasarnya merupakan komponen investasi mencapai 33,77 persen. Ekspor neto Tahun 2011 mengalami defisit sekitar 6,78 persen yang ditandai oleh tingginya nilai impor terhadap ekspor.

Gambar 34. PDRB Sulawesi Tenggara Menurut Komponen Penggunaan/Sisi Permintaan Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Prov. Sultra tahun 2013

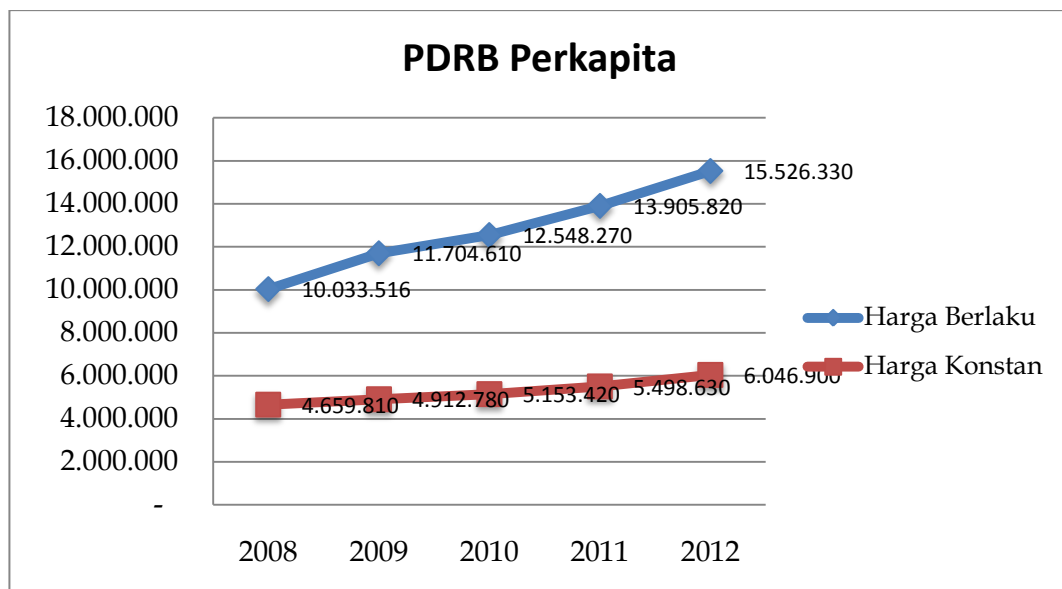
F. PDRB Per Kapita dan Distribusi Pendapatan

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB per kapita. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2011

adalah 14,067 juta rupiah. Nilai tersebut telah meningkat 90,32 persen dari keadaan tahun 2010. Pertumbuhan PDRB per kapita itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga produksi. Hal itu dapat ditunjukkan dengan peningkatan indeks implisit yang bergerak dari 243,51 tahun 2010 menjadi 252,98 pada tahun 2011.

Tren peningkatan pendapatan perkapita masyarakat atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan disajikan pada gambar berikut :

Gambar 35. Perkembangan Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Prov Sultra Tahun 2013

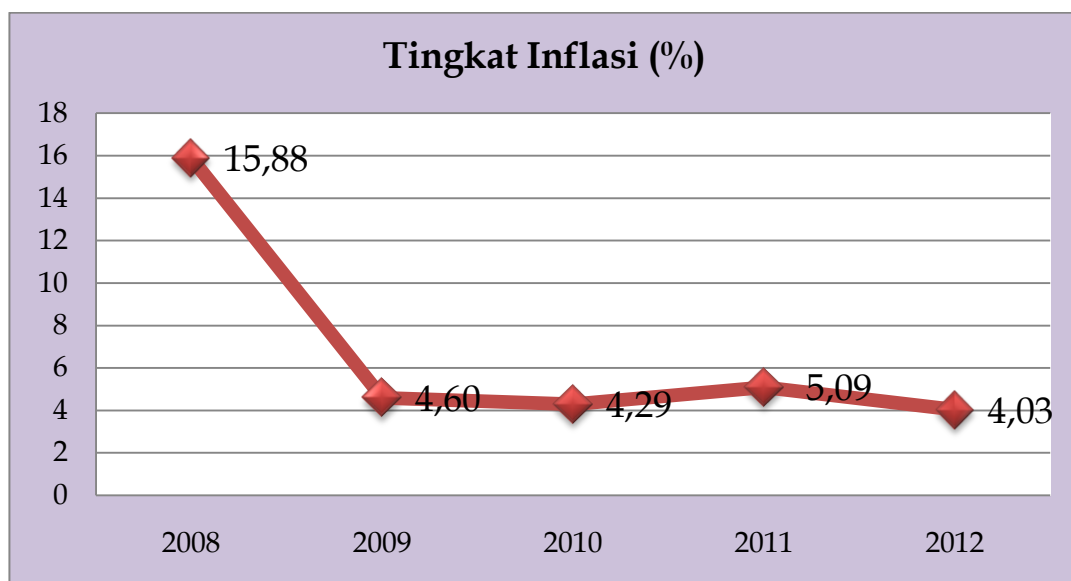
Gambar tersebut di atas, memberikan informasi bahwa kesejahteraan penduduk Sulawesi Tenggara selama Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 mengalami peningkatan. Fakta ini menunjukkan pula bahwa strategi dan kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat di daerah ini telah memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah.

G. Laju Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Inflasi dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam beberapa tahun terakhir inflasi Sulawesi Tenggara cenderung berada di atas rata-rata inflasi nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada jalannya roda perekonomian.

Laju inflasi di Sulawesi Tenggara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen di Kota Kendari pada beberapa tahun terakhir ini selalu lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pertumbuhan yang telah dicapai. Laju inflasi 2008-2012 dapat terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 36. Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Prov. Sultra, 2013

Gambar tersebut menunjukkan laju inflasi dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 cenderung mengalami ketidakstabilan yang ditunjukkan dengan fluktuasi laju inflasi pada tingkat satu hingga dua digit. Namun

inflasi cukup terkendali pada Tahun 2010 laju inflasi mencapai 4,29 persen dan Tahun 2011 mencapai 4,61 persen serta pada Tahun 2012 mencapai 4,03 persen. Namun pada Tahun 2008 pernah mencapai 15,88 persen, yang disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan harga-harag barang secara umum.

3.1.2. Target Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 dan Tahun 2014

Perkembangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang menunjukkan perkembangan yang berkualitas dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini ditandai dengan capaian-capaian indikator makro ekonomi yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mengurangi pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi pembangunan daerah 2008-2013 dan dilanjutkan dengan RPJMD 2013-2018.

Mempertahankan pertumbuhan diatas rata-rata 8 persen merupakan tantangan strategis perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen yang sudah dicapai pada tahun 2010 dan di atas 10 persen tahun 2012. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi yang saat ini masih relatif kecil dibanding rata-rata provinsi secara nasional. Untuk memelihara stabilitas pertumbuhan di atas rata-

rata 8 persen, pemerintah provinsi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mendorong revitalisasi di sektor pertanian yang cenderung mengalami penurunan angka pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan dengan merevitalisasi produktivitas dan produksi sub-sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar sektor pertanian di Sulawesi Tenggara. Penelitian dan pengembangan serta pemasaran di sub-sektor perkebunan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas produksi perkebunan (khususnya Kakao) dan juga berorientasi ekspor.
- b. Mengelola secara baik transisi ekonomi dan ketenagakerjaan dari sektor primer ke sektor tersier dengan terus mendorong investasi di sektor infrastruktur. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; transportasi dan komunikasi; serta jasa merupakan sektor dengan pertumbuhan tinggi disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang juga tinggi yang perlu terus didorong dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- c. Mengelola investasi di sektor pertambangan dengan prioritas pada peningkatkan stabilitas pertumbuhan produksi sektor pertambangan yang cenderung berfluktuasi melalui pengelolaan, perluasan, dan pengendalian ijin usaha yang profesional. Stabilitas pertumbuhan sektor pertambangan dapat berdampak pada stabilnya pertumbuhan industri manufaktur di Sulawesi Tenggara yang sebagian besar inputnya berasal dari pertambangan.

Meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda penting dalam 2 tahun ke depan (2013 dan 2014). Tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara di bidang sosial terletak pada peningkatan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan sehingga dapat mengejar target pengurangan kemiskinan yang sudah

ditetapkan. Merujuk pada target penurunan angka kemiskinan tahun 2013 menjadi 10 persen, dan pencapaian angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 14,6 persen dan 13,06 persen Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendorong penurunan angka kemiskinan setidaknya 2,3 persen per tahun dalam dua tahun ke depan (2013 dan 2014)

Proyeksi indikator makro ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada tabel 35 berikut:

Tabel 35 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 dan 2014

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Proyeksi	
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	8,68	10,41	10,50-10,60	10,60-10,70
2	PDRB Per Kapita				
	a Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah)	13,90	15,52	16,00	17,00
	b Atas Harga Konstan (Juta Rupiah)	5,49	6,04	7,00	8,00
3	Tingkat Inflasi	5,09	4,03	4,50-4,70	5,00-5,50
4	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (%)				
	a Konsumsi Rumah Tangga	52,03	51,86	51	50
	b Konsumsi Pemerintah	21,31	21,15	21,00	20
	c PMTB	32,77	33,77	34	35
	d Ekspor Neto	(6,11)	(6,78)	(5,00)	(4,00)
5	Jumlah Penduduk Miskin (%)	14,61	13,06	13,00-12,50	12,50-11,50
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,06	4,04	4,00-3,50	3,50-3,00

Sumber : BPS Prov. Sultra (diolah), 2013

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa target indikator makro tersebut di atas dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sumberdaya alam yang cukup potensial baik pertanian dalam arti luas maupun pertambangan terutama nikel, emas dan aspal perlu dikelola dengan baik dalam upaya peningkatan nilai

tambah sehingga diharapkan terbangunnya industri pengolahan komoditas tersebut, yang dapat memberikan *multiplayer efek* bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara

- b. Peningkatan infrastruktur publik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, listrik dan air bersih, dapat membuka aksesibilitas barang dan jasa sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi
- c. Kegiatan investasi semakin meningkat terutama sektor swasta yang ditunjukkan oleh peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2013 dan Tahun 2014 : Daya Saing Sumberdaya Alam

Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2013 dan 2014 akan semakin meningkat. Syaratnya daya saing wilayah harus ditingkatkan untuk menarik investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal dalam Negeri. Pada Tahun 2011 Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 77 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 18,93 Trilyun dan Penanaman Modal Luar Negeri sebanyak 123 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 8,91 Juta. Hal ini dapat dilihat pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang semakin meningkat dari 31,77 persen pada Tahun 2011 dan pada Tahun 2012 menjadi 33,77 persen. Positifnya perkembangan investasi di Sulawesi Tenggara didorong oleh gencarnya usaha pemerintah daerah dalam menjaring investor, di samping itu penciptaan iklim investasi dengan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan listrik.

Pada tahun 2013, perkembangan investasi di Sulawesi Tenggara diperkirakan akan cukup tinggi seiring dengan masuknya beberapa

investor yang bergerak pada bidang pertambangan (pembangunan Smelter) dan bidang perdagangan dan jasa untuk membangun kawasan bisnis di Teluk Kendari. Selain itu, komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui sistem investasi satu atap dengan telah terbangunnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), juga turut mendorong peningkatan investasi di Sulawesi Tenggara. Mulai pulihnya perekonomian global yang mendorong peningkatan permintaan dunia menjadi penyebab utama meningkatnya ekspor Sulawesi Tenggara khususnya untuk komoditas biji nikel dan ferro nikel. Selain itu, permintaan dunia yang cukup tinggi akan komoditas biji kakao yang dibarengi dengan membaiknya produksi komoditas biji kakao baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga turut mendorong peningkatan ekspor.

Pada Tahun 2013 dan 2014 investasi swasta diharapkan berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan syarat beberapa investor telah merealisasikan investasinya pada tahun ini. Untuk itu pemerintah Provinsi harus bekerja keras memperbaiki infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan kelistrikan, kelonggaran ketentuan perijinan dan perpajakan serta pungutan lainnya untuk menarik investor menanamkan modalnya di wilayah ini.

Prospek ekonomi Sulawesi Tenggara diperkirakan tetap akan mengalami peningkatan pada Tahun 2013 dan 2014, karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti pelabuhan, listrik dan kualitas jalan yang terus semakin baik, yang dapat membuka aksesibilitas wilayah dalam upaya akselerasi percepatan pembangunan ekonomi daerah.
2. Kebijakan pengembangan klaster prioritas dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama sektor pertambangan dan

pertanian dalam arti luas untuk meningkatkan nilai tambah yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di mana Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam KEI IV (Sulawesi).

3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui perluasan akses keuangan masyarakat melalui BPR dan Program Bantuan *Block Grant* melalui klaster infrastruktur sebagai bagian dari program BAHTERAMAS telah mampu menstimulasi perekonomian di pedesaan dan mampu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa.
4. Kebijakan pengembangan daya saing beberapa komoditas unggulan daerah yang semakin baik dengan pembagian beberapa komoditi berdasarkan klaster, seperti pusat industri pertambangan nikel di Konawe Utara, Kolaka Utara dan Bombana, pusat industri kakao di Ladongi Kolaka, pusat pengembangan perikanan terpadu di Wawonii Konawe Kepulauan, pusat pengembangan industri semen di Muna dan pusat pengembangan wisata Wakatobi.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sulawesi Tenggara 2013-2018, yang merupakan lanjutan dari RPJMD Tahun 2008-2013, dalam rangka mewujudkan visi **SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING** dan menjalankan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 ditempuh 4 (empat) strategi pembangunan daerah yaitu :

- 1 Pembangunan yang bertumpu pada manusia (*people centered development*)

- 2 Pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan (*growth center development*)
- 3 Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*)
- 4 Pengarus-utamaan gender (*gender mainstreaming*)

Berdasarkan visi, misi dan pendekatan pembangunan daerah tersebut di atas maka ditetapkan 5 (lima) Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 yaitu :

Agenda I : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia,

Agenda II : Revitalisasi Pemerintahan Daerah,

Agenda III : Pembangunan Ekonomi,

Agenda IV : Memantapkan Pembangunan Budaya Daerah,

Agenda V : Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dasar, kewilayahan serta infrastruktur pada Kawasan Strategis

Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pertanian

- 1) Peningkatan Kemampuan/ Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian
- 2) Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dalam Mendukung Ketahanan Pangan
- 3) Mengembangkan Sistem Akses Pemasaran Komoditas Hasil Pertanian
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air secara lestari, dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan, mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian

- 5) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian sekaligus Pendapatan Pertanian melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi Diversifikasi dan Rehabilitasi serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
- 6) Peningkatan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak
- 7) Revitalisasi sistem pembibitan ternak, meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, dan memperkuat kelembagaan peternakan disemua lapisan dan otoritas veteriner
- 8) Mengembangkan Sistem Akses Pemasaran Hasil Peternakan
- 9) Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan Rekayasa Teknologi Peternakan

b. Bidang Perkebunan dan Hortikultura

- 1) Penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan sertifikasi lahan
- 2) Penerapan budidaya tanaman Hortikultura berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan sertifikasi lahan
- 3) Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif
- 4) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera
- 5) Pembangunan kawasan komoditi unggulan terpadu

- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan Jalan Produksi dan Jalan Desa

c. Bidang Kehutanan

- 1) Melaksanakan padu serasi kawasan hutan melalui perencanaan makro, pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan .
- 2) Melaksanakan penataan organisasi pengelolaan kawasan hutan melalui fasilitasi pembentukan lembaga kehutanan.
- 3) Memberikan kepastian penggunaan kawasan hutan melalui perizinan, rekomendasi, pertimbangan teknis dan evaluasi .
- 4) Rehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi, reklamasi, restorasi dan penghijauan.
- 5) Revitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui Pelayanan terpadu satu pintu, debirokratisasi, transparansi mekanisme dan biaya.
- 6) Mengembangkan sertifikasi hasil hutan dan turunannya melalui pengelolaan hutan produksi lestari.
- 7) Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan kemasyarakatan dan hutan desa.
- 8) Pelestarian, pengembangan dan promosi potensi jasa lingkungan melalui identifikasi, inventarisasi dan sosialisasi potensi kawasan hutan.
- 9) Penegakkan hukum secara konsisten melalui pengamanan dan perlindungan kawasan hutan

d. Bidang Energi

- 1) Meningkatkan supply energi melalui kajian kebutuhan energi.
- 2) Memperbaiki distribusi melalui pembinaan dan pengawasan bidang minyak dan gas bumi

- 3) Meningkatkan gerakan hemat energi melalui sosialisasi dan konversi minyak ke gas elpiji.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.
- 5) Membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan transmisi.

e. Bidang Pertambangan

- 1) Menciptakan iklim yang baik bagi investasi bidang sumber daya mineral melalui pengawasan dan pembinaan perusahaan dibidang energi dan sumber daya mineral
- 2) Mendukung penelitian dan pengembangan potensi sumber daya mineral melalui Penyebarluasan data dan informasi potensi sumber daya mineral
- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan potensi ESDM melalui pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha pertambangan rakyat.
- 4) Mendukung penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar potensi sumber daya mineral
- 5) Kerjasama antar sector dalam hal pengembangan infrastruktur dasar wilayah melalui koordinasi antar sector dibidang pertambangan

f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan
- 2) Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara

- 3) Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan Jaminan sosial Pekerja/Buruh
- 4) Peningkatan intensitas dan kualitas melalui pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum
- 5) Pembangunan permukiman baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pengembangan kawasan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi
- 6) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan kapasitas menuju kemandirian
- 7) Melakukan transformasi kesempatan kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier melalui pengembangan pasar kerja, mengembangkan kebijakan pada sektor sekunder, dan tersier serta pembukaan lapangan kerja baru.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan kerja dan sertifikasi serta penetapan Upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak.
- 9) Mengembangkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor pembangunan melalui pengembangan informasi pasar kerja, pengembangan kebijakan pendidikan dan pengembangan pelatihan berdasarkan permintaan.
- 10) Mengembangkan regulasi dan penegakkan hukum ketenagakerjaan melalui pengembangan edukasi dan mediasi ketenagakerjaan.

- 11) Mengembangkan satuan-satuan pemukiman berbasis kawasan melalui perencanaan kawasan secara terpadu, clear and clean, dan pengembangan 4 layak.

g. Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan
- 2) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan
- 3) Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR
- 4) Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan
- 5) Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur
- 6) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan
- 7) Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pengembangan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil dan penetapan kawasan konservasi laut daerah

- 8) Pendayagunaan pulau-pulau kecil melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil
- 9) Pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat, operasi pengawasan secara reguler dan terpadu, serta peningkatan sarana prasarana pengawasan

h. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Melaksanakan inisiasi penumbuhan industri menengah baru yang mengolah sumberdaya alam daerah melalui penyusunan rencana penumbuhan dan pengembangan, pengajuan anggaran, pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha IKM melalui diklat Teknis dan manajemen usaha.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha industri melalui penyuluhan, pendampingan, Bimbingan Teknis oleh Tenaga Fungsional Penyuluh, Fasilitator, TPL, dan Konsultan Diagnosis IKM (Shindanshi).
- 4) Meningkatkan kemampuan Teknologi industri melalui Bantuan Mesin dan Peralatan.
- 5) Meningkatkan kemampuan Teknologi industri melalui penyebaran informasi teknologi.
- 6) Meningkatkan kualitas produk industri melalui penerapan SNI, Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), PMT/GKM, ISO.
- 7) Meningkatkan daya saing produk industri melalui pengembangan label dan kemasan oleh Rumah Kemasan Dinas Perindag

- 8) Meningkatkan pemasaran IKM melalui promosi dan pameran dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- 9) Meningkatkan kemampuan permodalan IKM melalui fasilitasi bantuan permodalan.
- 10) Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah melalui peningkatan informasi peluang investasi di sektor industri skala besar melalui penyusunan profil peluang investasi, pengembangan data base potensi komoditi, pameran investasi di dalam dan luar negeri, penyediaan Kawasan Industri.
- 11) Penyediaan prasarana dan sarana perdagangan melalui pembangunan pasar, penyediaan sarana pergudangan
- 12) Meningkatkan jumlah eksportir di daerah melalui pengembangan kapasitas pengusaha.
- 13) Meningkatkan jumlah produk komoditas eksport melalui pengembangan jenis komoditas,
- 14) Meningkatkan informasi pasar produk eksport daerah melalui media promosi dan pameran dalam negeri, negara tujuan eksport potensial serta pameran internasional
- 15) Peningkatan pengawasan barang dan jasa beredar melalui tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, monitoring, pengembangan laboratorium UPTD Metrologi, dan pengembangan kapasitas PPNS
- 16) Pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen melalui sosialisasi, fasilitasi perlindungan konsumen.
- 17) Pengujian dan sertifikasi produk / komoditi melalui optimalisasi peran dan fungsi UPTD BPSMB

i. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
- 2) Peningkatan kualitas Daerah Tujuan Wisata dan industri pariwisata yang berkelanjutan
- 3) Penguatan Sinergitas keterpaduan pemasaran dan promosi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha.
- 4) Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan
- 5) Peningkatan apresiasi, inovasi produk dan kemampuan kewirausahaan

j. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam melalui pendidikan teknis, sertifikasi,
- 2) Rekrutmen tenaga teknis bidang lingkungan hidup melalui seleksi berbasis kebutuhan dan kompetensi
- 3) Peningkatan koordinasi antara kelembagaan provinsi dan kabupaten / kota melalui pembinaan dan pengawasan
- 4) Mengembangkan sistem pelayanan prima melalui debirokratisasi dan PTSP
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui penetapan regulasi, mengembangkan Standar Operational Procedure (SOP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- 6) Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian dampak lingkungan hidup.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari **(1) Pendapatan Asli Daerah** yang terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; **(2) Dana Perimbangan** yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); **(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, terdiri dari Hibah.

Seiring dengan tuntutan ketentuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, kebijakan umum pendapatan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- 1 Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang berfungsi pelayanan publik yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah.
- 2 Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam khususnya di Sektor Pertambangan dan Penggalian peningkatan Sektor Pertanian dalam arti luas melalui peningkatan nilai tambah komoditi tersebut.
- 3 Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan peningkatan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional serta peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

- 4 Peningkatan dana bagi hasil pajak maupun non pajak/sumberdaya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan target pendapatan daerah pada Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 2,063,515,325,092,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 464,654,529,434,- dari target Tahun 2013 dan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 541,058,905,064,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pajak Daerah sebesar Rp. 420,014,722,566,-
- b) Retribusi Daerah sebesar Rp. 22,252,643,616,-
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 16,185,829,794 -
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 82,605,709,088,-

Kenaikan PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa sumbangan pihak ketiga dari para investor di bidang pertambangan dan yang lainnya.

2) Target Dana Perimbangan

Target Dana Perimbangan pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1,367,682,957,894,- yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH), Iuran Eksploitasi (Royalti), Iuran Tetap (Landrent), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU untuk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1,051,254,835,500,-. sedangkan DAK ditargetkan sebesar Rp. 54,087,360,000,-, dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 107,567,300,261,-.

3) Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara ditarget memperoleh tambahan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berupa Dana Penyesuaian Sebesar Rp. 154,773,462,133,-. Rekapitulasi kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel 36 berikut :

Tabel 36. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013-2014

No	Jenis Pendapatn Daerah	Realisasi					Target	
		2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Asli Daerah	140,365,467,264	296,603,456,548	223,128,480,722	339,360,819,004	346,169,830,959	443,614,368,012	541,058,905,064
	1.1. Pajak Daerah	99,492,414,515	150,462,598,850	171,402,250,571	202,929,980,966	262,509,201,604	341,261,962,085	420,014,722,566
	1.2. Retribusi Daerah	16,656,739,807	19,790,108,796	40,252,603,584	51,035,765,321	18,543,869,680	20,398,256,648	22,252,643,616
	1.3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,904,920,287	11,732,028,078	4,871,003,708	14,103,892,280	13,488,191,495	14,837,010,645	16,185,829,794
	1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15,311,392,655	114,618,720,824	6,602,622,859	71,291,180,437	51,628,568,180	67,117,138,634	82,605,709,088
2	Dana Perimbangan	524,663,375,677	657,211,240,177	705,062,821,830	691,637,811,276	817,385,234,124	1,015,147,364,943	1,367,682,957,894
	2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,822,375,677	60,909,858,177	58,900,687,830	71,842,992,276	82,744,077,124	95,155,688,693	107,567,300,261
	2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	461,841,000,000	566,435,382,000	589,844,134,000	595,762,419,000	700,836,557,000	876,045,696,250	1,051,254,835,500
	2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	29,866,000,000	56,318,000,000	24,032,400,000	33,804,600,000	43,945,980,000	54,087,360,000
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14,871,422,077	4,034,070,400	59,502,778,000	24,175,000,000	125,424,663,273	140,099,062,703	154,773,462,133
	3.1 Hibah	4,871,422,077			24,175,000,000	84,741,046,746	93,215,151,421	101,689,256,095
	3.2 Dana Darurat							
	3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda lainnya							
	3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus	10,000,000,000	4,034,070,400	59,502,778,000		38,728,571,000	44,537,856,650	50,347,142,300
	3.5 Dana Bantuan Keuangan dari prov atau Pemda Lainnya					1,955,045,527	2,346,054,632	2,737,063,738
	Jumlah Pendapatan	679,900,265,018	957,848,767,125	987,694,080,552	1,055,173,630,280	1,288,979,728,356	1,598,860,795,657	2,063,515,325,092

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, 2013 (diolah)

Berdasarkan kebijakan umum pendapatan daerah tersebut pada Tabel di atas maka upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan kewenangan dalam penetapan tarif, peningkatan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.

- 2 Peningkatan potensi pajak sebenarnya dalam upaya meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
- 3 Meningkatkan kapasitas fiskal melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.
- 4 Meningkatkan pengelolaan asset daerah melalui sensus barang daerah yang memiliki nilai ekonomis secara efektif dan efisien.
- 5 Meningkatkan kinerja pengelolaan Perusahaan Daerah melalui efisiensi dan efektifitas manajemen.
- 6 Optimalisasi sumbangan pihak ketiga melalui pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja dalam APBD dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD yang berpengaruh terhadap prestasi kerja yang susah diukur. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program-program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja yang dapat terukur. Pengelolaan belanja langsung pada prinsipnya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dimana setiap alokasi belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau pencapaian hasil yang diharapkan.

Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2014 diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang melekat pada urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Target belanja daerah pada Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 2,532,183,783,770 -, terdiri dari : belanja tidak langsung sebesar

Rp. 1,084,744,736,170,- yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai (gaji dan Tunjangan PNS) , Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Sementara belanja langsung pada Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 1,447,439,047,600,- yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dalam rangka membiayai program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2014.

Tabel 37. Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2014

No	Uraian	Realisasi			Target	
		2009	2010	2011	2013	2014
A	Belanja Tidak Langsung	446,271,524,605	597,811,704,897	699,679,828,320	956,389,766,887	1,084,744,736,170
1	Belanja Pegawai	286,532,406,394	312,193,784,967	346,075,530,658	484,505,742,921	553,720,849,053
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	17,724,951,975	7,860,207,000	9,616,003,468	11,346,884,092	12,212,324,404
5	Belanja Bantuan Sosial	10,019,034,611	75,477,399,621	18,176,487,725	19,630,606,743	20,357,666,252
6	Belanja Bagi Hasil	60,160,658,250	79,660,625,009	73,047,479,632	87,656,975,558	94,961,723,522
7	Belanja Bantuan Keuangan	70,729,016,875	120,671,756,500	250,939,326,837	351,315,057,572	401,502,922,939
8	Belanja Tidak Terduga	1,105,456,500	1,947,931,800	1,825,000,000	1,934,500,000	1,989,250,000
B	Belanja Langsung	673,428,859,619	527,876,245,834	628,344,871,639	1,174,407,655,613	1,447,439,047,600
1	Belanja Pegawai	111,288,326,996	64,253,625,779	62,281,696,919	87,194,375,687	99,650,715,070
2	Belanja Barang dan Jasa	260,377,146,872	228,258,763,062	224,565,347,569	404,217,625,624	494,043,764,652
3	Belanja Modal	301,763,385,751	235,363,856,993	341,497,827,151	682,995,654,302	853,744,567,878
	Total	1,119,700,384,224	1,125,687,950,731	1,328,024,699,959	2,130,797,422,499	2,532,183,783,770

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, 2013 (diolah)